

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa manajemen perkantoran Notaris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan manajemen perkantoran Notaris di Kota Palembang? 2) Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap pemeriksaan manajemen perkantoran Notaris Kota Palembang?. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan teori teori kewenangan, teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, teori penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen perkantoran pada kantor Notaris terdiri dari perencanaan, pengorganisasia, pengarahaan dan pengawasaan. Notaris harus memperhatikan dan perlu menerapkan manajemen kantornya dengan baik dalam keempat fungsi tersebut agar terarah dan berjalan efektif dan efisien. Notaris di Palembang dalam melaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan pelayanannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Tetapi dalam hal pengorganisasiannya masih terdapat yang belum maksimal yaitu dalam pengorganisasian akta dimana tidak adanya atau tidak diisinya buku daftar protes, karena terbatasnya yang dapat digunakan ketika pembacaan dan penandatanganan akta dan penyimpanan akta yang belum tertaata dengan baik. Kemudian Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dalam melaksanakan pengawasan manajemen perkantoran Notaris berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang tentang Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris, dan melakukan pemeriksaan rutin minimal satu tahun sekali. Notaris yang lalai maka MPD memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Notaris yang bersangkutan untuk segera memperbaiki dan melaporkan perbaikannya kepada MPD. Disamping itu, MPD bersifat terbuka kepada setiap Notaris yang ingin bertanya terutama para Notaris baru yang memiliki kesulitan dalam mengelola admnitrasi di kantornya. Hal tersebut dilakukan untuk meminilisir pelanggaran Notaris di kemudian hari. Setelah pemeriksaan, dinilai belum sepenuhnya efektif karena sulitnya berkumpul antara sesama anggota MPD untuk menyusun laporan dan terdapat Notaris yang tidak menjalankan saran yang diberikan MPD.

Kata kunci: *Manajemen Perkantoran, dan Notaris.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the management of a Notary's office. The formulation of the problem in this research are: 1) How is the implementation of Notary office management in Palembang City? 2) What is the role of the Regional Supervisory Council in examining the management of the Palembang City Notary Office? This type of research is empirical juridical using analytical descriptive methods, using authority theory, responsibility theory, legal certainty theory, law enforcement theory. The results showed that the office management at the Notary's office consisted of planning, organizing, directing and supervising. Notaries must pay attention and need to implement their office management properly in these four functions so that they are directed and run effectively and efficiently. Notaries in Palembang in carrying out to improve facilities and infrastructure and services in accordance with the Law on Notary Positions (UUJN), but in terms of organization there are still things that have not been maximized, namely in organizing deeds where there is no or no protest register book, due to the limited number of people who can be used when reading and signing deeds and storing deeds that have not been properly adhered to. Then based on the Palembang City Notary Regional Supervisor in carrying out supervision of the Notary office management, the appointment of the Chair of the Palembang City Notary Regional Supervisory Board regarding the Minutes of Notary Protocol Examination, and conducting routine inspections for at least one year. If the Notary is negligent, then the MPD will give a sanction in the form of a verbal warning to the Notary concerned to immediately correct it and report the repair to the MPD. In addition, MPD is open to any Notary who wants to be asked, especially new Notaries who have difficulties in managing administration in their offices. This is done to minimize Notary violations in the future. After the examination, it was judged not to be fully effective due to the difficulty of gathering among MPD members to compile reports and there were notaries who did not carry out the advice given by the MPD.

Keywords: Office Management, and Notary.